

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.

HADIST:

Al-Bukhari, *Hadist Shahih Nomor Hadist 2546*, Kitab Washiyat.

BUKU :

Anggraeni, Nita, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI)*, Serang: UIN SMH Banten, 2020.

Arta, Faisar Ananda, Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Attamimi, A Hamid. *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1996

Dzajuli, H,A, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi*, Jakarta, 2005.

Efendi, Jonaedi, Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Revisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Huda, H UU Nurul, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2007

Iqbal, Hakim Javid, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Iqbal, Muhamad. *FIQH SIYASAH Kontekstual Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2014.

Koenjordingrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.

- Muchariman, Randi, Helmi Al Djufri, *Fiqh Sisayah Kebangsaan: Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun*, Purwokerto: Penulis Media, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasrillah, Achmad Muzammil Alfian, *FIQH SIYASAH Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Pancasilawai, Abnan, Vience Ratna Mult Wijaya, Esti Royani. 2023. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif dan Hukum Islam*. Purwokerto: CV Amerta Media, 2023.
- Purwanti, Sumy Hasty, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Prespektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Simatupang: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Sapto, Sigit Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, dkk. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Sugijokanto, Suzie, *Cegah Kekerasan pada Anak*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Sugiono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suryani Lilis, *Bunga Rampai Gagasan Baru dalam Membangun Kota Layak Anak*. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2023.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.
- Yuwono, Ismanto Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpres Digital, 2015.

JURNAL:

Dania, Ira Aini. “Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 2020.

Darahudi, Gagah, Pia Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian”, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, 3(5), 2024.

Erdianti, Ratni Novita, Sholahuddin Al-Fatih. “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 2019.

Kayowua, Kayus, Mohamad Helmi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak”, *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 2020.

Octaviani, Fachiria, Nunung Nurwati, “Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas”*, 3(2), 2021.

Patilima, Hamid, “Kabupaten Layak Anak”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 2007.

Siti, Ika Maisyaroh, Abdul, Abid, “Childfree dalam Perspektif Masalah Ammah”, *Journal Of Economics, Law, and Humanties*, 3(2), 2024.

Yuniati, Ati, Sepriadi, Andika, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 2021.

SKRIPSI:

Ayu, Widi Novitasari, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Prespektif Fiqh Siyasah”, Skripsi Program S1, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

NovitaSari Widi Ayu. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak

Anak Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan edung Srian Kabupaten Lampung Barat”, Skripsi Program S1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Supatmi, “Implikasi Perda Kota Serang dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak” (Studi Perda Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang”, Skripsi Program S1, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024.

Umami, Reza., “Implementasi UU NO 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi Program S1, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

Peraturan Undang-Undang:

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak

Wawancara:

Ibu Mila Oktaviani, S.Kep.Ners.M.Si selaku Kepala UPT PPA Pandeglang,
(22 Mei 2025). Di Kantor UPT PPA Pandeglang

Ibu Rt.Nina Maryana, S.Sos., M A.P selaku Anggota Jabatan Fungsional
Analisis Kebijakan Bidang Tumbuh Kembang Anak

Ibu Dewi Yuliani A.Md.Kom selaku Pranata Kearsipan di DP2KBP3A
Kabupaten Pandeglang, (22 Mei 2025). Di Kantor DP2KBP3A
Kabupaten Pandeglang

L

A

M

P

I

R

A

N

TRANSKIP WAWANCARA

Identitas Narasumber		
Nama	:	Mila Oktaviani
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jabatan	:	Kepala Dinas UPT PPA Pandeglang
Identitas Mahasiswa		
Nama	:	Shella Puspita Sari
Nim	:	211120074
Prodi/Semester	:	Hukum Tata Negara/sem 9
Pertanyaan 1	:	Kapan UPT PPA Pandeglang ini mulai beroperasi secara resmi?
Jawaban 1	:	UPT PPA dari dulu sudah ada akan tetapi dipegangnya sama ibu-ibu Pejabat kaya Sekda, tapi dulu disebutnya P2TPA, baru pas 2022 UPT PPA berada dibawah naungan DP2KBP3A
Pertanyaan 2	:	Bagaimana UPT PPA dalam mendukung implementasi Perda tentang Kabupaten Layak Anak?
Jawaban 2	:	Kita harus tau dulu Kabupaten Layak Anak tu seperti apa artinya, kan arti dari Kabupaten Layak Anak yaitu Kabupaten yang aman dan ramah bagi anak, jadi untuk mendukung dan penerapkan Perda itu kami disini berusaha memberikan layanan, fasilitas, edukasi, dan perlindungan untuk anak-anak
Pertanyaan 3	:	Apa saja Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT PPA untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak?
Jawaban 3	:	Program dan kegiatan yang sekarang kami lakukan biasanya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap perlindungan anak dan juga hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Biasanya kita mengadakan kegiatan itu kadang 1 bulan 4/5 kali
Pertanyaan 4	:	Menurut ibu sendiri, Kabupaten Layak Anak itu seperti apa?

Jawaban 4	:	sama seperti penjelasan yang awal yang udah dijelasin kabupaten layak anak ya kabupaten yang aman untuk anak
Pertanyaan 5	:	Bagaimana pihak UPT PPA dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak?
Jawaban 5	:	Pihak UPT PPA dalam menangani kasus itu pertama dengan cara menyediakan fasilitas untuk pengaduan, nah dari situ nanti ada proses Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, pendampingan terhadap korban.
Pertanyaan 6	:	Siapa saja pihak yang dilibatkan UPT PPA dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak?
Jawaban 6	:	Pihak yang ikut terlibat dalam hal ini itu kepolisian, Psikolog, pihak RS, Dinsos, LSM
Pertanyaan 7	:	Selama 3 tahun terakhir apakah kasus itu terus meningkat atau bagaimana bu? Dan kalo boleh tau apakah Data bisa dilihat oleh Publik?
Jawaban 7	:	Kita gabisa bilang meningkat atau menurun karna kan gasemua korban berani untuk bilang, tapi sejauh ini berdasarkan data yang didapat tergolong menurun, karena pada tahun 2022 terdapat 94 kasus, 2023 74, 2024 64 dan 2025 dari januari sampai mei 20 kasus. Dan untuk data kita tidak bisa memberikan secara publik karena demi merahasiakan identitas para Korban juga jd paling disini saya hanya bisa menyebutkan apalagi hal ini berkaitan dengan anak-anak
Pertanyaan 8	:	Dampak-dampak yang sering ditemukan pada korban Kekerasan Seksual itu seperti apa?
Jawaban 8	:	Dampak yang paling banyak itu berupa trauma, ketakutan berlebih, hingga mengurung diri dan menjauh dari masyarakat sekitar
Pertanyaan 9	:	Biasanya kendala-kendala yang ditemukan saat menangani kasus Kekerasan Seksual di Pandeglang apa saja? Dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut?
Jawaban 9	:	Kendala yang pertama itu SDM yang rendah, terus miskom antara penerima dan pelapor, pandangan masyarakat mengenai masalah kekerasan seksual karena bagi mereka ini aib, dan yang terakhir jarak antaran kantor pelayanan dan

		tempat kediaman korban
Pertanyaan 10	:	Menurut Ibu apakah Pandeglang sudah bisa dikatakan menjadi Kabupaten Layak Anak?
Jawaban 10	:	Belum bisa dibilang sebagai Kabupaten Anak, karena masih banyak anak-anak yang belum terpenuhi mengenai hak-haknya baik itu hak perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Namun kami beserta pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak itu

Identitas Narasumber		
Nama	:	Rt. Nina Maryana
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jabatan	:	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Bidang Tumbuh Kembang Anak
Identitas Mahasiswa		
Nama	:	Shella Puspita Sari
Nim	:	211120074
Prodi/Semester	:	Hukum Tata Negara/sem 9
Pertanyaan 1	:	Bagaimana DP2KBP3A Pandeglang dalam mendukung implementasi Perda tentang Kabupaten Layak Anak?
Jawaban 1	:	Kami mendukung dengan cara memberikan layanan perlindungan anak, edukasi, serta pendampingan yang dibutuhkan oleh anak-anak, apalagi anak yang menjadi korban tindakan kejahatan
Pertanyaan 2	:	Apa saja Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A Pandeglang untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak?
Jawaban 2	:	Disini kita lebih fokus memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi. Selain itu kami menyediakan konsultasi hak anak dan forum anak
Pertanyaan 3	:	Apakah DP2KBP3A memiliki unit atau tim Khusus dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak?
Jawaban 3	:	Iya kami memiliki tim Khusus untuk menangani kasus

		tersebut, tim nya ya itu UPT PPA jadi kami bekerjasama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi
Pertanyaan 4	:	Apakah tantangan dan Kendala yang sering dihadapi dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak?
Jawaban 4	:	Kendalanya paling di SDM
Pertanyaan 5	:	Menurut ibu definisi Kabupaten Layak Anak seperti apa?
Jawaban 5	:	Hmm Kabupaten layak anak menurut saya sendiri kabupaten yang menjamin hak anak ntah itu perlindungan, partisipasi, pendidikan, dan juga tumbuh kembang anak

Identitas Narasumber		
Nama	:	Dewi Yuliani
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jabatan	:	Pranata Kearsipan DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang
Identitas Mahasiswa		
Nama	:	Shella Puspita Sari
Nim	:	211120074
Prodi/Semester	:	Hukum Tata Negara/sem 9
Pertanyaan 1	:	Dapatkah Ibu menjelaskan secara singkat profil dari DP2KBP3A Pandeglang?
Jawaban 1	:	DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang terletak di Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, berdiri di atas lahan $\pm$ 800m.
Pertanyaan 2	:	Di DP2KBP3A Pandeglang terdapat bidang apa? Dan kalo boleh jelaskan secara singkat mengenai tugas dan fungsi bidang tersebut?
Jawaban 2	:	Bidang-bidang yang ada disini itu bidang tumbuh kembang anak, bidang pemberdayaan perempuan, bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, selain bidang ini DP2KBP3A juga punya UPT, ada UPT PPA, UPT P2KBPA, UPT keluar berencana, sama UPT gudang alat kontasepsi
Pertanyaan 3	:	Apa saja tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan

		DP2KBP3A?
Jawaban 3	:	Tujuannya ya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, terus juga untuk melindungi perempuan dan anak, terutama dari kekerasan. Jadi supaya semua program terkait itu bisa lebih terarah dan terkoordinasi.
Pertanyaan 4	:	Apa Visi dan Misi dari DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang?
Jawaban 4	:	Untuk visi nya terwujudnya Pandeglang Berkah melalui transformasi harmoni agrobisnis, maritimbisnis dan wisatabisnis menuju rumah sehat dan keluarga sejahtera, sedangkan untuk Misi nya nanti saya kirim lewat file aja ya
Pertanyaan 5	:	Bagaimana struktur organisasi DP2KBP3A Pandeglang?
Jawaban 5	:	Nanti saya kirim file aja

DOKUMENTASI

(Wawancara Bersama Ibu Mila Oktaviani,
S.Kep.Ners.M.Si selaku Kepala UPT PPA)



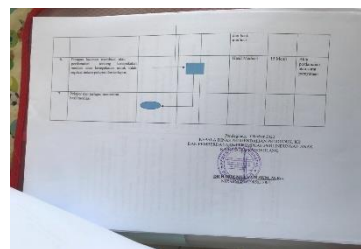
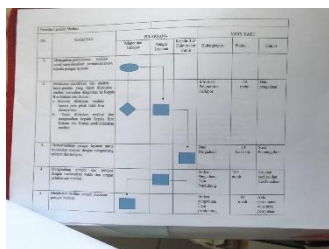
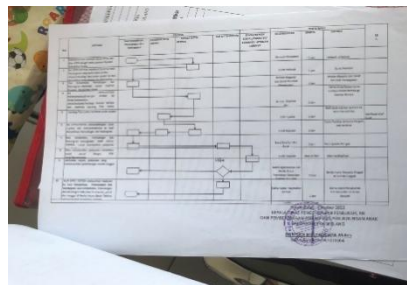
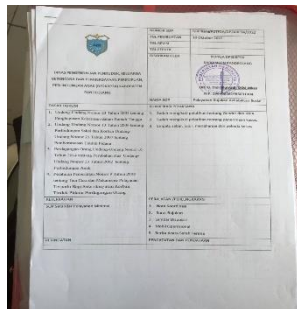
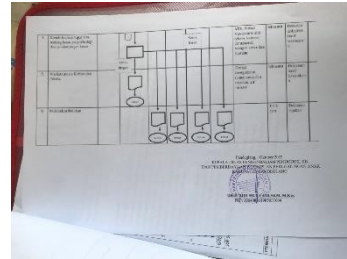
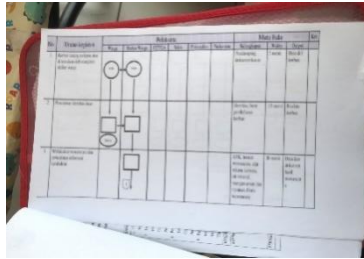
Wawancara bersama Ibu Rt. Nina Maryana,
S.Sos., M A.P selaku JF Analisis Kebijakan
Tumbuh Kembang Anak DP2KBP3A
Pandeglang



Wawancara bersama Ibu Dewi Yuliani A.Md.Kom.
selaku Pranata Kearsipan DP2KBP3A Pandeglang



Kualifikasi Pelaksana



Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan DP2KBP3A dan UPT PPA



Surat Izin Penelitian untuk DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 1058/Un.17/F.11/PP.00.9/04/2025
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**

Di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

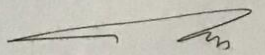
Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Shella Puspita Sari**
Nim : **211120074**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pand**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di **Serang**
Pada Tanggal **24 April 2025**
a.n Dekan
Wakil Dekan 1


Dr. H Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1002

Struktur Organisasi yang dipajang di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang

